



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERANAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Rahmat¹, Yandi Putra Marpaung², Bea Mondari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email:¹ rahmathidayah2585@gmail.com, ² Yandi Putra Marpaung@gmail.com, ³ Bea Mondari@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal. Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembinaan ideologi Pancasila oleh pemerintah kota serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melaksanakan pembinaan melalui pendidikan karakter di sekolah, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penguatan kegiatan masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi ideologi di kalangan pemuda dan kurangnya alokasi anggaran masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pembinaan ideologis ini.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, pembinaan ideologi, Pancasila, Tanjungbalai.

Abstract

Fostering the Pancasila ideology is a shared responsibility of all elements of the nation, including local governments as the spearhead of national policy implementation at the local level. The Tanjungbalai City Government plays a crucial role in strengthening Pancasila values within a pluralistic society. This study aims to analyze the forms of Pancasila ideology fostered by the city government and the effectiveness of their implementation in the field. The method used is a juridical-sociological approach, with data collected through literature and documentation studies. The study results indicate that the Tanjungbalai City Government has implemented fostering through character education in schools, training for civil servants, and strengthening community activities based on Pancasila values. However, challenges such as low ideological literacy among youth and insufficient budget allocation remain obstacles to optimizing this ideological fostering.

Keywords: Local government, ideological fostering, Pancasila, Tanjungbalai.

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur sebagai landasan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, di tengah arus globalisasi, derasnya informasi digital, serta meningkatnya tantangan terhadap persatuan nasional,

keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi berbagai ujian. Generasi muda cenderung mengalami krisis identitas kebangsaan, toleransi sosial mulai memudar, dan semangat gotong royong semakin tergeser oleh sikap individualisme.

Dalam konteks ini, pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi peran strategis pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat lokal. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, maupun kegiatan sosial budaya yang diarahkan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di daerah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam membina ideologi Pancasila serta mengevaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan kebijakan ideologis yang lebih terarah dan berdampak luas bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan, program, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat Kota Tanjung Balai.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu:

1. **Data primer**, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparaturnya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pelaku kegiatan pembinaan ideologi.
2. **Data sekunder**, diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan kegiatan pemerintah kota, serta literatur terkait pembinaan ideologi Pancasila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan observasi terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan ideologi yang dilakukan di wilayah Kota Tanjungbalai. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data lapangan untuk memahami pola, peran, serta efektivitas kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah kota. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan dan Strategi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Tanjungbalai

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menetapkan pembinaan ideologi Pancasila sebagai bagian dari misi pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, di mana penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat gotong royong menjadi prioritas dalam sektor pendidikan, sosial, dan pemerintahan. Pemerintah kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) secara rutin menyelenggarakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pendidikan ideologi Pancasila bagi pelajar, tokoh masyarakat, serta aparat sipil negara.

Program yang diimplementasikan meliputi pelatihan kader bela negara, diskusi publik bertema kebangsaan, penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), serta kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan solidaritas antarwarga. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan juga menjadi bagian dari strategi membumikan Pancasila secara masif.

2. Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Edukasi dan Internalisasi Nilai Pancasila

Pemerintah Kota Tanjungbalai mengambil peran sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan pembinaan ideologi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diintegrasikan dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, seperti kegiatan bakti sosial lintas agama, gotong royong kampung, dan pelatihan etika pelayanan publik bagi aparatur.

Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya ideologi Pancasila, keterbatasan anggaran pembinaan, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi pasca-kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan pemerintah telah menunjukkan komitmen, namun efektivitas implementasi sangat tergantung pada kesinambungan, partisipasi masyarakat, dan penguatan peran lintas sektor.

3. Dampak dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan pemerintah kota memberi dampak positif dalam meningkatkan wawasan

kebangsaan, memperkuat toleransi antarwarga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Program pendidikan Pancasila di sekolah juga mulai menunjukkan hasil dalam membentuk sikap disiplin, hormat pada perbedaan, dan kecintaan terhadap tanah air.

Namun, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi secara terukur menyebabkan sulitnya mengukur capaian jangka panjang dari kegiatan pembinaan tersebut. Diperlukan instrumen evaluasi berbasis indikator capaian ideologis dan sosial, agar pemerintah daerah dapat merancang kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila sebagai upaya memperkuat identitas kebangsaan dan menjaga integritas sosial masyarakat di tengah tantangan globalisasi dan pergeseran nilai. Melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pendidikan wawasan kebangsaan, pelatihan bela negara, dan kegiatan sosial berbasis nilai-nilai Pancasila, pemerintah kota menunjukkan komitmennya dalam menginternalisasikan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, ketidakakuratan data penerima manfaat, keterbatasan anggaran, serta kecenderungan masyarakat terhadap pola pikir yang bergantung pada bantuan. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih holistik dan berbasis data, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh

di tingkat daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). Pedoman Umum Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP RI.*
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.*
- Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri No. 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Jakarta: Kemendagri RI.*
- Kosasih, D. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Lubis, M. (2017). Peran Pemerintah Daerah dalam Menanamkan Nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5(2), 98–109.*
- Soedarsono. (2020). Tantangan Ideologi Pancasila di Era Digital. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 12(1), 55–67.*
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.*